



## **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 ( BAHAN LKPJ KEPALA DAERAH )**



### **BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BKPM&PPT)**

**Jl. Setia Budi No.15. Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>  
PADANG**



## **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **Urusan Wajib Penanaman Modal**

#### **1. PROGRAM DAN KEGIATAN**

---

**B**adan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPM & PPT) Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program kerja dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan penanaman modal di daerah. Di dalam mewujudkan program kerjanya, BKPM & PPT tahun 2016 ini mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 8.838.488.705,-** dan telah direalisasikan sampai dengan keadaan 31 Desember 2016 sebesar **Rp. 8.284.623.544,- (93,73%)**. Untuk Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan untuk Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan PNS, dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah) mendapat dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 4.308.747,705,-** dengan realisasi per 31 Desember 2016 sebesar **Rp. 4.197.541.104,- (97,42%)**. Sementara itu program kerja yang disusun dalam bentuk kegiatan, dimana rencana program kerja yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur, dialokasikan melalui Belanja Langsung (yang terdiri dari Belanja Langsung Pokok dan Belanja Langsung Urusan) dengan jumlah dana sebesar **Rp. 4.529.741.000,-** dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar **Rp. 4.087.082.440,- (90,23%)**. Program BKPM & PPT tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan dukungan dana sebesar Rp. 808.205.748,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 755.527.216,- (93,48%).
- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan dukungan dana sebesar Rp. 808.506.500,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 686.940.484,- (84,96%).

- c. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** dengan dukungan dana sebesar Rp. 31.320.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 31.320.000,- (100%).
- d. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan dukungan dana sebesar Rp. 147.922.000,- dengan realisasi sampai 31 Desember 2016 sebesar Rp. 147.777.000,- (99,90%).
- e. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan dukungan dana sebesar Rp. 274.928.752,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 243.863.750,- (88,70%).
- f. **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** dengan dukungan dana sebesar Rp. 1.788.798.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.633.419.948,- (91,31%).
- g. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu** dengan dukungan dana sebesar Rp. 670.060.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 588.234.042,- (87,79%).

Untuk mewujudkan program kerja BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat telah disusun kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

## **I. BELANJA LANGSUNG POKOK**

### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah

11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

**B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Meubeleur
3. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
4. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur
9. Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD

**C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

**D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
3. Penatausahaan Keuangan SKPD
4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan

## **II. BELANJA LANGSUNG URUSAN**

**A. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

1. Penyelesaian Permasalahan Investasi
2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal

3. Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Forum Investasi Sumatera Barat
5. Penyusunan Insentif Penanaman Modal
6. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat
7. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
8. Penyelenggaraan Promosi Investasi
9. Gelar Potensi dan Temu Usaha
10. Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dengan UMKMK
11. Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha
12. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal
13. Pembuatan Bahan / Materi Promosi Investasi
14. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat
15. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi Sektor Industri
16. Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi
17. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi
18. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
19. Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota

**B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu**

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Forum PTSP
3. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

## **2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

**D**ari program dan kegiatan yang telah disusun BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2016 hampir semua kegiatan dapat diselesaikan 100% dan dapat mencapai target kinerja output. Bahkan ada beberapa kegiatan yang kinerja outputnya melebihi target (>100%).

Adapun uraian pelaksanaan kegiatan BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Belanja Langsung Urusan sebagai berikut:

#### **A. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Adapun Kegiatan-kegiatan untuk mendukung terwujudnya pencapaian target program ini, sebagai berikut :

- a. Penyelesaian Permasalahan Investasi** dengan jumlah dana sebesar Rp. 79.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.146.400,- (77,40%), dengan realisasi fisik capaiannya sebesar 100%. Kinerja keluaran dapat tercapai melebihi target. Rendahnya penyerapan anggaran di bawah 90% disebabkan karena perjalanan dinas ke Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak dilaksanakan dikarenakan belum adanya permasalahan yang akan diproses dan difasilitasi serta sisa anggaran seperti tiket pesawat.
  - Maksud dari kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi yaitu implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, dan BKPM & PPT Prov. Sumbar beserta Badan/Kantor Penanaman modal atau yang menangani fungsi Penanaman Modal di Kab/Kota merupakan lembaga yang mengkoordinir kegiatan investasi PMA/PMDN yang menjadi kewenangan masing-masing yang diharapkan dapat membantu para penanam modal agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan yang berarti.
  - Tujuan kegiatan adalah agar permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMDN/PMA di Kabupaten/Kota khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya dapat di fasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu Tim koordinasi penanaman modal yang melibatkan instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- Keluaran atau output dari kegiatan ini:
1. Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat yang difasilitasi permasalahannya sebanyak 4 perusahaan PMA/PMDN sedangkan yang bisa difasilitasi adalah 9 perusahaan (melebihi target), yaitu PT. Padang Sumatera Sawindo, CV. Batu Tongga, PT. Andalas *Mining Resources*, CV. Ziqri Bersaudara, CV. Talago Dibawah Gunung, PT. *Limaco Energie*, PT. Atoz Nusantara Mining, CV. Indo Jaya Perkasa, dan PT. Multikarya Sawit Prima.
  2. Pembahasan proses penyelesaian permasalahan perusahaan sebanyak 4 kali (sesuai target).

Hasil (*Outcome*) kegiatan adalah tercapainya solusi pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat sebanyak 8 perusahaan PMA/PMDN, dapat terealisasi melebihi target (3 perusahaan PMA/PMDN). Kedelapan perusahaan tersebut adalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu perusahaan yang difasilitasi permasalahannya, kecuali PT. Multikarya Sawit Prima, ini terkait batas wilayah Kab. Solok Selatan dengan Kab. Dharmasraya.

- b. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal** dengan jumlah dana sebesar Rp. 44.300.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.379.300,- (97,92%), dan realisasi fisik juga tercapai 100%.

Kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal ini dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi kebijakan/aturan di bidang penanaman modal kepada penyelenggara pemerintahan di kabupaten/kota, tokoh masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Penyelenggara pemerintahan di kabupaten/kota, Masyarakat dan Dunia Usaha mengenai kebijakan atau aturan terkait penanaman modal. Pelaksanaan acara Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal ini dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016 di Kabupaten Dharmasraya. Peserta yang hadir sebanyak 85 orang (sesuai target) yang terdiri dari Wali Nagari, Ketua KAN, Camat, perusahaan, pegawai BPMP2T Kab. Dharmasraya, serta SKPD terkait di Kab. Dharmasraya. Adapun materi dan narasumber pada sosialisasi ini



adalah: (a) Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan (disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan BKPM & PPT Provinsi Sumbar, Ir. Olyandes, S.Pt); (b) Tatacara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (disampaikan oleh Kepala UPTB-PTSP, Delmi, B.Sc.) dan (c) Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal (disampaikan oleh Dr. Kurniawarman, SH, M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Unand). Secara keseluruhan pelaksanaan acara berlangsung dengan sukses, dengan antusiasme peserta berupa banyak pertanyaan dan masukan, terutama terkait dengan materi Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah peserta yang mendapat sosialisasi kebijakan/regulasi terkait penanaman modal sebanyak 85 peserta (sesuai target) dengan hasil adanya pemahaman Aparatur Provinsi dan Kab/kota, dunia usaha dan tokoh masyarakat tentang kebijakan di bidang penanaman modal sebanyak 85 orang.

**c. Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan jumlah dana sebesar Rp. 24.992.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.992.300,- (100%), untuk realisasi fisik tercapai 100%, sesuai dengan target.

- Maksud diadakannya Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah agar penanam modal/perusahaan yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal memahami tentang kewajiban dan tanggung-jawabnya sebagai penanam modal.
- Tujuan diadakan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah untuk meningkatkan pemahaman penanaman modal ini adalah untuk meningkatkan pemahaman penanaman modal/perusahaan PMA/PMDN tentang realisasi penanaman modal, bimbingan yang diadakan kepada perusahaan diharapkan penanaman modal/perusahaan memahami tentang kewajiban yaitu seperti :

- a. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing
- c. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- d. Melakukan tanggung jawab sosial perusahaan
- e. Menyampaikan LKPM
- f. Menyampaikan laporan realisasi informasi mesin/barang dan bahan
- g. Menyampaikan Laporan realisasi informasi berdasarkan API
- h. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
- i. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan
- j. Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bimbingan dan penyuluhan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2016, bertempat di ruang rapat Gubernur, Jln. Jend. Sudirman No. 48 Padang. Peserta Bimbingan dan penyuluhan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal berjumlah 60 orang dari perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat.

Keluaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan pengendalian pelaksanaan penanaman modal bagi perusahaan PMA/PMDN untuk 60 orang (sesuai target). Hasil dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman perusahaan terkait pengisian LKPM sebanyak 60 orang (sesuai target).

**d. Forum Investasi Sumatera Barat** dengan jumlah dana sebesar Rp. 33.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.058.500,- (36,54%) dan fisiknya hanya terealisasi sebesar 65% disebabkan pelaksanaan forum investasi yang direncanakan 2 kali pertemuan hanya terlaksana 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak bisa hadirnya narasumber dari BKPRN Pusat untuk memberikan materi tentang permasalahan investasi khususnya tentang Permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga antara tata ruang dan investasi bisa bersinergi dan tidak menjadi salah satu penghambat untuk investasi di Sumatera Barat.

Maksud dari kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat yaitu sebagai wujud tanggung jawab BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat dan SKPD lintas Sektor dan Badan/Kantor Penanaman Modal atau yang membidangi fungsi penanaman Modal di Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Badan/Kantor penanaman Modal atau yang menangani fungsi Penanaman Modal di Kab/Kota. Kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat bertujuan untuk mengakomodir segala permasalahan yang dihadapi oleh Badan/Kantor Penanaman Modal atau yang menangani fungsi penanaman modal di kabupaten/kota dalam menghadapi permasalahan perusahaan dan sebagainya untuk dicarikan solusi pemecahannya.

Pertemuan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur pada tanggal 26 September 2016. Peserta pertemuan Forum Investasi Sumatera Barat adalah SKPD lintas sektor dan Badan / Kantor penanaman modal atau yang menangani fungsi penanaman modal di Kabupaten/Kota.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat ini adalah:

1. Terlaksananya forum Investasi dalam rangka memonitor dan mengatasi permasalahan investasi di Sumatera Barat untuk 100 orang peserta lintas SKPD dan pihak terkait sebanyak 2 kali pertemuan, sedangkan yang dapat terlaksana adalah 1 kali pertemuan dengan peserta 50 orang.

2. Adanya rumusan terhadap permasalahan/kendala investasi sebanyak 2 rumusan, sedangkan yang terlaksana baru 1 rumusan dikarenakan pertemuan forum investasi yang dilaksanakan hanya 1 kali pertemuan.

Sedangkan hasil yang diperoleh dari Forum Investasi ini adalah adanya 1 solusi terhadap permasalahan investasi di Sumatera Barat yang dirumuskan pada pertemuan Forum ini (target 2 solusi).

- e. **Penyusunan Insentif Penanaman Modal** dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.458.050,- (89,13%) dan fisiknya terealisasi sebesar 100%.

Kegiatan Penyusunan Insentif Penanaman Modal ini dimaksudkan agar pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Untuk menyusun kebijakan/aturan terkait pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- b. Untuk menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat.

Adapun keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dapat tercapai sesuai target dan sudah disampaikan ke Biro Hukum melalui surat kepala BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat nomor: 570/671/Perenc-2016 pada tanggal 28 Desember 2016. Hasil kegiatan ini adalah adanya pemberian insentif penanaman modal bagi investor di Provinsi Sumatera Barat.

- f. **Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat** dengan jumlah dana sebesar Rp. 80.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.121.976,- (92,65%), dan realisasi fisik tercapai 100%.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan data dan informasi tentang penanaman modal yang *up to date* serta informatif. Buku Data Perkembangan Modal Sumatera Barat tahun 2015 sebagai dasar untuk perencanaan, pengembangan, pengendalian dan menyusun kebijakan daerah mengenai penanaman modal.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat tahun 2016 dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data penanaman modal PMA dan PMDN dari BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat dan data PMDN Non Fasilitas berdasarkan izin-izin yang dikeluarkan oleh PDKPM yang ada di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat serta *cross check* data yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI secara periodik.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah buku Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Tahun 2016 sebanyak 100 (seratus) buku, dapat dicapai sesuai target. Hasil dari kegiatan ini adalah dapat dimanfaatkannya data perkembangan realisasi investasi fasilitas dan non fasilitas di Sumatera Barat bagi pengambil kebijakan dan dunia usaha sebanyak 19 kab/kota.

- g. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan jumlah dana sebesar Rp. 108.007.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 92.179.100,- atau sebesar 85,34%, dan realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. Penyerapan anggaran dibawah 90% karena disebabkan karena kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pada BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat yang ditunda pelaksanaannya dengan jumlah penundaan anggaran Rp. 7.420.000,-, sehingga sisa anggaran yang dapat dibelanjakan adalah sebesar Rp. 100.587.700,-, artinya realisasi keuangan kegiatan ini sebenarnya telah tercapai 88,17%, selebihnya merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah (sisa tiket pesawat) dan sisa BBM.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal serta melakukan kegiatan pembuatan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMA/PMDN untuk penerbitan izin usaha dilakukan terhadap perusahaan yang sudah memproduksi komersil dan telah merealisasikan investasinya minimal 75% dari rencana dan untuk proses pencabutan Surat Persetujuan/pembatalan dilakukan bagi perusahaan yang tidak pernah merealisasikan investasinya sama sekali dan tidak lagi memproduksi atau macet serta tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Dengan demikian maksud dan tujuan dilaksanakan Pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN adalah agar penyimpangan yang dilakukan para penanam modal dapat diminimalisir sesuai ketentuan yang berlaku dan BKPM & PPT Provinsi tidak lagi mencatat data perusahaan yang tidak produktif sehingga data yang ada akan lebih baik serta diharapkan target realisasi investasi yang telah ditetapkan dapat dicapai.

- Keluaran dari kegiatan ini adalah:
  1. Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN sebanyak 12 perusahaan (tercapai sesuai target), yaitu:
    - 5 perusahaan sudah produksi
    - 6 perusahaan masih dalam masa konstruksi
    - 1 perusahaan tidak ada aktifitas dilapangan (tidak merealisasikan investasinya) atau macet
  2. Pembuatan BAP Penerbitan dan Pencabutan Izin Prinsip/SP terhadap 10 perusahaan (sesuai target 10 perusahaan), yaitu:
    - 3 Perusahaan untuk izin usaha tetap
    - 7 Perusahaan BAP pencabutan
- Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah:
  - Adanya penyampaian LKPM oleh perusahaan PMA/PMDN dan pelaksanaan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 12 perusahaan (dapat mencapai target 12 perusahaan).
  - Adanya kemudahan bagi investor dalam pengurusan Izin Usaha Tetap (IUT) dan terlaksananya pencabutan Surat Persetujuan

(SP) bagi perusahaan yang macet sebanyak 10 perusahaan dapat tercapai sesuai target.

- h. Penyelenggaraan Promosi Investasi** dengan jumlah dana sebesar Rp. 433.594.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 431.247.404,- (99,46%), dan untuk fisik realisasinya juga 100%.

Maksud dan tujuan diadakan Promosi Investasi adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha (investor) sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi, untuk menarik minat dari calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat, dan membangun citra positif yang dapat menimbulkan kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi yang menguntungkan.

Uraian pelaksanaan kegiatan ini meliputi promosi investasi ke dalam dan luar negeri dengan melaksanakan misi investasi dan mengikuti beberapa *event*, yaitu:

1. Rapat Koordinasi Bidang Promosi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 24 s.d 25 Februari 2016, di Hotel Pullman Jakarta Indonesia, diselenggarakan oleh BKPM RI (Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal. Kegiatan ini mengundang seluruh BPM-PTSP se Indonesia dan dihadiri oleh pembicara Menteri Luar Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala BKPM RI, BPN RI, MEE, dan seluruh Direktur di Deputy Promosi BKPM RI.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah mensinkronisasi kegiatan promosi investasi di daerah dengan BKPM RI, tidak hanya menyangkut materi promosi, namun juga lokasi promosi, iven yang dipilih serta personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan promosi.

2. Sosialisasi Kegiatan *Outward Investment* dan Kemitraan dengan BKPM RI dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2016 di Jakarta. Penyelenggara kegiatan ini adalah BKPM RI bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Piata Indonezia di Rumania, Bucharest.

Topik utama dalam sosialisasi promosi ke Burma, Laos, Vietnam dan Thailand adalah merupakan rencana BKPM RI mengadakan promosi ke negara tersebut dalam rangka menjual investasi dan perdagangan yang selama ini masih belum sebanyak dengan negara-negara lain di kawasan itu.

Kegiatan ini dihadiri oleh 33 undangan yang terdiri dari seluruh BPM-PTSP se Indonesia dengan jumlah peserta masing-masing 2 (dua) orang, perwakilan duta besar RI untuk keempat negara, para pelaku usaha perdagangan dan industri dan seluruh personil Deputi Fasilitasi Usaha UMKM BKPM RI.

Dalam rapat sosialisasi dijelaskan oleh masing-masing duta besar pada keempat negara bahwa peluang investasi dan perdagangan Indonesia ke negara tersebut dan sebaliknya sangat terbuka lebar sehingga direncanakan akan ada promosi bersama yang melibatkan BKPM RI, Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai anggaran serta pelaku usaha yang berminat dalam perdagangan antar negara. Kegiatan ini juga diadakan tanya jawab antara peserta sosialisasi dengan pemakalah dan pada negara yang akan dilakukan promosi.

3. Pameran Produk Unggulan Khas Daerah (PUKD) dan PKBL *Expo* 2016 pada tanggal 21 s.d 24 April 2016 di *Java Supermall*, Semarang. Penyelenggara kegiatan ini adalah PT. Panca Wira Kreasindo. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.

Kegiatan ini merupakan pameran berkala nasional yang menampilkan investasi dan perdagangan yang bertujuan untuk menampilkan potensi dan peluang investasi serta produk-produk unggulan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, perusahaan swasta, BUMN/BUMD serta instansi terkait lainnya dari seluruh Indonesia guna menarik calon investor dari dalam dan luar negeri.

Selama dilaksanakannya iven tersebut ada beberapa calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain :

- Benny, Jakarta yang tertarik pada sektor perkebunan (gambir)



- Susilorini, Semarang yang tertarik pada sektor perkebunan (kakao)
4. Rapat Survei Lokasi dan Pemilihan *Event Organizer* Sumatera Barat *Expo* Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 11 Mei 2016 di Bandung dan Jakarta.
- Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil rapat persiapan Sumatera Barat Tahun 2016 di Bandung bersama SKPD terkait pada tanggal pada tanggal 5 April 2016 di Padang.
- Untuk kepastian tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu segera dilakukan survey lokasi yang akan dilanjutkan dengan penetapan *event organizer* (EO) sebagai penyelenggara Kegiatan *Sumatera Barat Expo* Tahun 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, BKPM dan PPT dan Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat.
- Hasil rapat tim yang telah melakukan survei ke lokasi yang telah ditetapkan untuk dijadikan tempat ajang pameran dan pertemuan *one on one meeting* di Gedung Merdeka, Bandung. Dan *event organizer* telah menyampaikan paparannya masing-masing yang sudah didengar oleh Tim *Sumbar Expo* dan PT. Jalan Kelima Kreasi sebagai pilihan penyelenggara kegiatan *Sumbar Expo* 2016.
5. Pelaksanaan *Road Show* Temu Bisnis di Lombok Tahun 2016.
- Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 bertempat di gedung/balai instansi pemerintah (Balai Sangkreang). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BKPM dan PPT Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya dan mengundang 40 (empat puluh) orang peserta dari unsur Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), *Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies* (ASITA), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan SKPD teknis terkait di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang nantinya akan menjembatani terbentuknya kerjasama dengan calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat. Selain itu *Road show* Temu Bisnis Tahun 2016 dimaksudkan untuk mempromosikan potensi dan

peluang investasi yang dimiliki Sumatera Barat kepada kalangan investor potensial dari dalam dan luar negeri di Lombok. Dipilihnya Lombok sebagai lokasi pelaksanaan *road show* temu bisnis dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikenal sebagai destinasi wisata syariah unggulan terbaik Indonesia. Hal ini diharapkan memberikan dampak positif dan bagi perkembangan iklim investasi daerah terutama di sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya di Sumatera Barat.

Pada kegiatan ini, BKPM dan PPT Provinsi Sumatera Barat juga mengikutsertakan kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto yang mempunyai peluang investasi terutama di sektor pariwisata dengan membuka kesempatan untuk melakukan paparan dan dialog investasi dengan pelaku usaha dengan mengangkat peluang investasi masing-masing kabupaten/kota.

Hasil kegiatan ini telah dilakukan penandatanganan *MoU* antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 074/04-1043/BKPM&PPT/2016 dan Nomor 074/305/BKPM –PPT/2016 mengenai kesepakatan kerjasama Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama khususnya di bidang Penanaman Modal. Dan juga dengan terjadinya kesepakatan tersebut maka pihak pemerintah NTB segera akan melakukan kunjungan balasan yang rencananya juga akan membawa beberapa orang calon investor ke Sumatera Barat untuk berinvestasi di sektor pariwisata.

Adapun untuk calon investor yang tertarik dalam kegiatan *Road show* Temu Bisnis tersebut adalah:

1. Za'far (Hotel Santika) yang tertarik pada sektor pariwisata
2. Dewantoro Uumbu Joka, SH ( Asita) yang tertarik pada sektor pariwisata.

6. *Regional Investment Forum (RIF 2016)*

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 25 s/d 27 Juli 2016 di Hotel Aryaduta, Palembang. Tahun 2016 ini, RIF mengangkat tema "*Exploring Sumatera's Regional Potential for Quality Investment*" dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan (Alex Nurdin) dan di hadiri oleh Kepala BKPM RI dalam hal ini diwakili oleh (Azhar Lubis, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM RI, Kepala Regional Penanaman Modal Wilayah Sumatera (BKPM RI) BPM-PTSP Wilayah Sumatera, investor asing dari Jepang, Korea, EU dan Taiwan, Investor dari IIPC dan PMA/PMDN.

RIF 2016 merupakan salah satu forum investasi terbesar di Indonesia yang diadakan oleh BKPM RI setiap tahunnya. Pada kesempatan ini penyelenggara (BKPM RI) membuka kesempatan kepada calon investor untuk melakukan *one on one meeting*, dialog strategis dengan pemangku kepentingan di daerah baik dari kalangan pemerintah maupun dunia usaha untuk memperoleh informasi secara langsung dan mengetahui secara detail peluang investasi di daerah termasuk ketersediaan lahan, informasi kawasan industry dan sebagainya.

Dalam *one on one meeting*, BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat sebagai koordinator Bidang Investasi Sumatera Barat mengkoordinir pertemuan dengan calon investor dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, BKPM & PPT mengikutsertakan Kota Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Solok Selatan.

Hasil dari pertemuan dimaksud, calon investor dari Australia (Peter Craven, *Lombok Marine del Ray*) yang berminat pada sektor Pariwisata (Wisata Bahari).

7. Forum Investasi Jogja PPI 2016

Forum Investasi Jogja PPI 2016 dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 28 Agustus 2016 di *Malioboro Mall*, Yogyakarta. Penyelenggara kegiatan ini adalah PT. Panca Wira Kreasindo. Kegiatan ini mengundang pemerintah pusat dan daerah se-Indonesia, pelaku usaha.

Kegiatan ini merupakan sasaran yang tepat dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar lebih dikenal luas oleh kalangan investor di dalam maupun luar negeri. Dengan mengikuti event ini diharapkan mampu mendorong dan merangsang masuknya investasi ke wilayah Sumatera Barat. Dalam kegiatan pameran produk unggulan khas daerah akan dapat menciptakan wahana interaksi bisnis langsung bagi pemerintah daerah dengan pengusaha, penyedia teknologi dan investor guna menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di bidang investasi, perdagangan, industri teknologi, sumberdaya manusia.

Diantaranya yang tertarik dengan peluang investasi di Sumatera Barat adalah;

1. Dr. H. Sabri Ramdhany, MM yang berminat pada sektor pariwisata.
  2. Michelle Gozum, *Direktur Marketing* berminat pada sektor energi
  3. Basir Ahmad, Consul General of India tertarik pada sektor pariwisata.
8. *Finalisasi Persiapan Pameran Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition (IIICE) Tahun 2016* dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 s.d 14 Oktober 2016. Persiapan kegiatan ini dilakukan untuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan IIICE 2016 seperti kondisi *existing stand*.
9. *Pameran Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition (IIICE) Tahun 2016* merupakan event terintegrasi Konferensi dan Pameran Infrastruktur terbesar di Indonesia tahun ini, dan merupakan event di tahun ke 6, adalah forum nasional terbesar bagi pemerintah dan sektor swasta untuk datang bersama-sama mengembangkan dan membangun potensi besar bisnis, kemitraan, berbagi pengetahuan, hingga teknologi terbaru di sektor infrastruktur. IIICE 2016 dikemas dalam konsep konferensi dan pameran, acara Infrastruktur Indonesia, yang akan menampilkan solusi infrastruktur dengan teknologi terbaru dari para peserta dan akan dihadiri para pemangku kepentingan dari dalam negeri maupun

dari dunia internasional. IIICE 2016 diadakan bersamaan dengan Pekan Infrastruktur Indonesia, meliputi sektor-sektor kunci infrastruktur termasuk Jalan, Kereta Api, Pelabuhan dan Energi. Pameran dan konferensi kali ini adalah forum nasional terkemuka untuk pemerintah dan sektor swasta untuk datang bersama-sama dan membangun kemitraan dengan tujuan mempercepat agenda infrastruktur USD \$ 450 milyar di Indonesia.

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari pada tanggal 9 s.d 11 November 2016 di *Jakarta Convention Center*. Kegiatan ini diresmikan oleh Presiden Bapak Jokowi yang didampingi oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perhubungan, Menteri PU dan Perumahan Rakyat dan Deputi Promosi BKPM RI.

Selain pelaksanaan pameran IIICE 2016 juga dilakukan konferensi *Regional Government 2016* yang difokuskan pada beberapa sektor, yaitu Pelabuhan, Transportasi, Listrik dan sirkulasi air.

Selama dilaksanakannya pameran tersebut ada beberapa calon investor yang menunjukkan ketertarikannya antara lain :

1. Helmi Maemozax, Presiden PT. Petronesia Energi Internasional, Jl. Salemba Tengah No. 13 10440 Jakarta , yang tertarik pada sektor energy (*geothermal*)
  2. Palu Li (Chief Rep. Indonesia), *SME Consultans International Ltd*, yang tertarik pada sektor energi (*geothermal*)
  3. Edy Santara, *Country Manager, Mercury Marine Singapore Pte Ltd*, Jakarta Indonesia yang tertarik pada sektor pariwisata (Jasa Rekreasi)
10. Sumatera Barat *Expo 2016 (Sumbar Expo 2016)* di Bandung
- Sumatera Barat *Expo (Sumbar Expo)* Tahun 2016 merupakan iven nasional tahunan ke 5 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan salah satu prioritas RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 yaitu Pengembangan Industri Pengolahan UMKM, Perdagangan dan Iklim Investasi serta menggali produktivitas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2016 ini, *Sumbar Expo* diikuti oleh SKPD

terkait, BUMN/BUMD dan Mitra Binaan, Forum Koordinasi Perwakilan seluruh Indonesia, Swasta, Masyarakat dan Pedagang Kuliner Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 24 s.d 27 November 2016 di Bandung dan dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, yang didampingi oleh oleh Gubernur Jawa Barat (H. Ahmad Heryawan), Wakil Gubernur Sumatera Barat (Nasrul Abit), Ketua Perhimpunan Keluarga Minang/PKM (Drs. Asril Das), Kepala Kantor Penghubung Sumatera Barat di Jakarta (Drs.Luhur Budiana), dan dihadiri oleh para undangan dari berbagai kalangan, antara lain Bupati/Walikota se-Sumatera Barat, Direktur Utama Bank Nagari, Komisaris PT. Semen Padang, Ketua Perhimpunan Keluarga Minang di Jabar, Ketua Ikatan Keluarga Lenggayang (IKWAL) Bandung (Faisal Kampai). Pada tahun ini mengambil tema "*West Sumatra Unique in Diversity*" menitik beratkan pada keunikan dan potensi unggulan yang dimiliki Sumbar kepada Indonesia dan juga dunia dalam sektor investasi, Pariwisata, Perdagangan dan UMKM.

Pengunjung/calon investor yang tertarik menanamkan modalnya terhadap sektor pariwisata adalah:

1. Suwit Biowang (*Economic Division Consulate in Songkhla*), alamat No.19 Sadao Road, Muang District Songkhla 90000 Thailand,telp (074)311544, 312210, Fax(074)44109, email: [suwibinwang@yahoo.com](mailto:suwibinwang@yahoo.com).
2. Lucia Martin (*Project Director*) *Oxford Business Group*, alamat Menara Karya 28 th Floor Jl. HR Rasuna Said Bloc x-5 kav 1-2 Jkt 12950 Indonesia.

Perjalanan Dinas Luar Negeri:

1. Temu investor di *Emirates Palace*, Abu Dhabi dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2016. Penyelenggara kegiatan ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Abu Dhabi dan *Indonesia Investment Promotion Center* (IIFE) dengan tujuan menyelenggarakan temu usaha bagi para pengusaha skala menengah kedua negara yang bergerak di sektor *power plant, mining, property*, industri rumah sakit, perhotelan, *tourism*,

*manpower* dan *agroindustry*. Pada kesempatan ini, penyelenggara memfasilitasi pertemuan "*one on one meeting*" bagi para pengusaha PEA yang berminat sebagai *partner/mitra* guna membicarakan lebih detail data dan informasi proyek serta aspek bisnis lainnya dengan pemangku kepentingan yang memiliki proyek yang siap untuk ditawarkan.

Dalam temu usaha ini, Sumatera Barat mengikutsertakan beberapa pengusaha lokal untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan dimaksud untuk dapat melakukan kerjasama dengan pengusaha lokal Abu Dhabi. Pada kesempatan tersebut, Sumbar juga menyampaikan materi presentasi tentang potensi dan peluang investasi di sektor unggulan diantaranya, pariwisata, energi terbarukan, industri hilir dan infrastruktur dimana sektor-sektor ini terbuka untuk investasi, terlebih lagi kebijakan Persatuan Emirat Arab yang mendorong para pelaku usahanya untuk lebih banyak berinvestasi ke luar negeri, sehingga kegiatan yang diprakarsai oleh Kedutaan Besar RI dan IIPC di Abu Dhabi merupakan suatu kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menarik investasi masuk ke Sumatera Barat. Hasil dari temu usaha ini, akan ditindaklanjuti dengan memprospek calon-calon investor untuk berkunjung ke Sumatera Barat sesuai dengan sektor yang diminati.

2. *Indonesia Fair di Perth, Western Australia* dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 November 2016.

Melalui Surat Undangan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Canberra No. 65.g/UND/EK/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 perihal Rencana Penyelenggaraan *Indonesia Fair di Perth, Western Australia* 11 s.d 13 November 2016, Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia menyampaikan undangan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat agar kegiatan ini dapat dihadiri oleh delegasi Provinsi Sumatera Barat sehingga melalui kegiatan ini berbagai proyek peluang investasi yang tersedia di Sumatera Barat dapat ditawarkan kepada para pelaku usaha dari Australia.

Penyelenggara kegiatan ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Australia dan *KJRI Perth dan PT. InConvex* menyelenggarakan *Indonesia Fair di Convention Centre, Perth, Western Australia*.

Pada Tahun 2016 ini, pada Indonesia Fair ini akan menggabungkan tiga kegiatan utama, yakni *Business Summit*, Festival Seni dan Budaya dan Kegiatan Pameran Dagang.

Pada kegiatan *Business Summit*, Perwakilan RI bekerjasama dengan Pemerintah Australia, *Australia-Indonesia Business Council (AIBC)*, *Austrade*, *Australia Chamber of Commerce and Industry (ACCI)*, akademisi dan media massa di Australia. Pada kegiatan tersebut nantinya akan dilakukan pula *one-on-one meeting* dengan metode *One Stop Service* dimana Kepala BKPM atau pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk hadir dan bertemu langsung dengan para investor dan pelaku usaha Australia guna membicarakan lebih detail data dan informasi proyek bagi pelaku usaha Australia yang berminat.

Selain itu, pada Kegiatan *Trade Fair*, Sumatera Barat berkesempatan untuk berpartisipasi dan menampilkan keberagaman seni dan budaya Sumatera Barat melalui hasil kerajinan Industri berupa *Fashion & Craft* dari para pengrajin Sumatera Barat. Melalui kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempromosikan kerajinan yang dimiliki oleh Sumatera Barat di luar negeri.

- i. **Gelar Potensi dan Temu Usaha** dengan jumlah dana sebesar Rp. 140.796.000,- dan realisasi sebesar Rp. 139.620.000,- (99,16%), untuk realisasi fisik tercapai 100%, sesuai dengan target.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

- Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka promosi sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu pertemuan dengan para calon investor.
- Menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat.



Penyelenggara dari kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha adalah merupakan kegiatan pertemuan koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi bersama Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi peluang investasi dengan para pengusaha perantau Minang, Asosiasi yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi, calon investor baik nasional maupun internasional.

Kegiatan ini pertama kali dilakukan dengan pihak PT. Pembangunan Jaya Ancol di Jakarta, dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menawarkan kepada perusahaan tersebut untuk dapat melakukan pengembangan wisata bahari secara profesional dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wisata bahari di Sumatera Barat. Pada kegiatan ini BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat mengikutsertakan beberapa instansi diantaranya:

- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kotayaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman.

Pada kegiatan ini BKPM & PPT menyampaikan kepada pihak perusahaan bahwa maksud kedatangan kami ke perusahaan tersebut adalah untuk mengadakan pertemuan misi investasi Sumatera Barat dan sekaligus melakukan *one on one meeting* sedangkan Kabupaten/Kota langsung menawarkan potensi peluang investasi yang ada di daerahnya kepada pihak perusahaan.

Selanjutnya kegiatan GPTU diadakan di Bandung yang bersamaan dengan kegiatan *Sumatera Barat Expo*. Pada kegiatan ini BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk dapat mempresentasikan peluang investasi yang ada di daerahnya masing-masing. Peserta kegiatan ini melibatkan Kepala Daerah Kab/Kota dan Perangkat Daerah Kab/Kota bidang Penanaman Modal sebanyak 4 (empat) daerah di Sumatera Barat dan para calon investor.

Tempat dilaksanakan kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha (GPTU) yaitu di Hotel Grand Prehanger Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2016. Dari pelaksanaan kegiatan ini BKPM & PPT memfasilitasi 4 (empat) Kab/Kota di Sumatera Barat yang melakukan

ekspose yaitu para Bupati dalam hal ini antara lain ekspose Kepala Daerah Kab/Kota dihadapan calon investor di Bandung, yakni Ketua Bappeda Mentawai, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Kepala Kantor Penanaman Modal Sijunjung, dan Sekretaris Daerah Kab. Solok Selatan. Pada pelaksanaan GPTU ini terdapat beberapa calon investor yang menunjukkan ketertarikannya antara lain :

- 1 Bambang Agus Roniyanto dari PT.Petronesia Energi Internasional yang tertarik terhadap potensi *Geothermal*
- 2 Raihoro Hever dari PT. Kandui Beach Villas yang tertarik berinvestasi di
  - *Eco Resort inland*
  - Budidaya rumput laut
  - *Marine Park*
  - *Golf Resort* di Pei Pei yang dilengkapi dengan sanggar budidaya seni kepulauan Mentawai.
- 3 H. Armet,SE tertarik di sektor pariwisata.
- 4 Doni Primanto/Novi dari Karsa Group yang tertarik disektor Perikanan & Kelautan, Energi, Pariwisata
- 5 Indrasari Halim dari perusahaan PT. Mineral Sutera Pesisir Selatan yang tertarik di sektor infrastruktur di Mentawai.

Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 60 orang.

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 5 calon investor (sesuai target).

**j. Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK**

dengan jumlah dana sebesar Rp. 66.700.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.679.950,- (96,97%), dan realisasi fisik tercapai 100%.

Maksud dan tujuan kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK adalah untuk memfasilitasi terjadinya pertemuan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKMK sehingga terjadinya suatu *transfer knowledge* dan berbagi informasi antara kedua belah pihak dengan tujuan diharapkan terbentuknya kesepakatan dalam

suatu kerjasama strategis yang saling menguntungkan dan berkesinambungan dalam pelaksanaannya untuk masa mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Padang Panjang dan Kota Solok, dengan waktu pelaksanaan dari bulan Januari sampai Desember 2016. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang pelaku UMKMK Kota Padang Panjang dan 40 orang pelaku UMKMK Kota Solok. Narasumber dari kegiatan ini adalah Tim dari CV.Bunda/*Reffan House*. Dari pelaksanaan kegiatan ini terjadinya kesepakatan/MoU antara CV.Bunda/*Reffan House* selaku Usaha Besar dengan 34 pelaku UMKMK Kota Padang Panjang dan terjadinya kesepakatan/MoU antara CV.Bunda/*Reffan House* selaku Usaha Besar dengan 36 pelaku UMKMK Kota Solok. Keluaran yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK dengan pengusaha besar untuk 80 orang di Kota Padang Panjang dan Kota Solok sebanyak 2 kali pertemuan (sesuai target). Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK sebanyak 70 kesepakatan (melebihi target 3 kesepakatan).

**k. Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha** dengan jumlah dana sebesar Rp. 39.006.000,- dan realisasi sebesar Rp. 32.709.500,- (83,86%). Untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%. Penyerapan anggaran dibawah 90% disebabkan karena efisiensi biaya perjalanan dinas dari sisa tiket dan efisiensi belanja BBM.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mempersiapkan Sumatera Barat sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan memasarkannya kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien.
2. Menarik investor khususnya investor asing, untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat.
3. Melakukan penyusunan rekomendasi yang berisikan langkah-langkah bagi percepatan peningkatan realisasi investasi di Sumatera Barat.

Kegiatan peningkatan kerjasama investasi dengan lembaga terkait dan dunia usaha dilaksanakan di Kota Padang dalam rangka pertemuan dengan stakeholder terkait dan di Jakarta serta Bandung untuk berkoordinasi dengan pihak Kementrian teknis terkait serta ke Kab./Kota di Sumatera Barat untuk koordinasi teknis, dengan waktu pelaksanaan bulan Januari sampai Desember 2016.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh keluaran telah terfasilitasinya kerjasama investasi pada 2 sektor, yaitu sektor panas bumi dan sektor pariwisata (sesuai target), dan telah dilaksanakan pertemuan dengan Kab./Kota bidang penanaman modal, bidang pariwisata, dan bidang ESDM sebanyak 2 (dua) kali pertemuan.

Hasil yang diperoleh adalah didapatkan rekomendasi untuk tindak lanjut 2 buah, yakni sektor panas bumi dan sektor pariwisata.

- I. **Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal** dengan jumlah dana sebesar Rp. 62.300.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.965.950,- (94,65%), serta realisasi fisik tercapai 100%.

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam membantu mendorong pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi spasial penanaman modal. Keegiatannya lebih diarahkan pada pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam, penataan data dan informasi yang meliputi potensi dan peluang investasi, pembangunan dan pengembangan basis data spasial serta terwujudnya jaringan sistem informasi perlu terus dikembangkan dan di update untuk mendukung perencanaan spasial pada tingkat regional/Provinsi yang terdiri dari peta kesesuaian lahan, status hutan, dan peta investasi existing. Hal ini dimaksud agar tersedianya data dasar utama secara lengkap dan benar serta berfungsi sebagai bank data dan jaringan data spasial sebagai faktor utama operasionalisasi.

Maksud kegiatan Updating Informasi Spasial Penanaman Modal adalah membuat peta dan database serta sistem informasi spasial energi terbarukan yang menampung data dan informasi spasial energi terbarukan di wilayah kerja BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat.

Adapun tujuan dilaksanakannya pekerjaan ini, yaitu agar:

- Tersedianya data spasial yang memetakan data energi terbarukan di Provinsi Sumatera Barat.
- Tersedianya database dan sistem informasi yang menghimpun data dan informasi spasial energi terbarukan di Provinsi Sumatera Barat.
- Memudahkan BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat dan pihak pihak lain yang terkait dalam mengakses/mendapatkan data dan informasi spasial energi terbarukan.

Pelaksanaan kegiatan Updating Informasi Spasial Penanaman Modal dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai potensi investasi sektor energi terbarukan yang tersedia di beberapa Kabupaten/Kota yang siap untuk dijadikan sumber energi listrik.

Keluaran dari kegiatan ini dapat terealisasi sesuai target (100%), yaitu:

1. 1 (satu) unit data spasial dasar dan tematik terbaru.
2. 1 (satu) buah data/informasi tematik dan spasial.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh hasil tersedianya Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal Sumatera Barat sebanyak 1 (satu) unit dapat tercapai sesuai target (100%).

- m. Pembuatan Bahan/Materi Promosi Investasi** dengan jumlah dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 93.693.800,- (93,69%), serta realisasi fisik tercapai 100%.

Maksud dari kegiatan ini adalah agar bahan informasi tentang potensi dan peluang investasi Sumatera Barat tersedia lengkap dengan data terkini dan dapat digunakan untuk keperluan promosi. Sementara itu tujuan kegiatan ini adalah menyediakan informasi tentang potensi dan peluang investasi daerah agar pengguna terutama calon investor tahu apa yang menjadi peluang untuk berinvestasi di Sumatera Barat dan menyediakan bahan penunjang pelaksanaan promosi investasi.

Pada tahun 2016, BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat membuat atau melakukan pengadaan 5 bahan materi promosi yaitu Peta Investasi, Pembuatan Tas Promosi, Pembuatan Map Investasi, Pembuatan *Souvenir* Eksklusif, Pembelian Flashdisk. Adapun pelaksana dari masing-masing pembuatan/pengadaan materi promosi tersebut adalah PT. CELYFA dan PD. Perdana Abadi.

Keluaran pada kegiatan ini dapat tercapai sesuai target, dengan rincian sebagai berikut:

- Peta investasi sebanyak 300 buah
- Tas promosi sebanyak 250 buah
- Map investasi sebanyak 200 buah
- Souvenir Eksklusif sebanyak 20 buah

Adapun hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya bahan presentasi tentang peluang investasi yang ada di Sumatera Barat yang akan ditawarkan kepada calon investor serta materi promosi sebanyak 4 (empat) macam materi promosi investasi (sesuai target).

**n. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat**

dengan jumlah dana sebesar Rp. 146.940.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 140.763.800,- (95,80%), dan realisasi fisik tercapai 100%.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah membuat direktori potensi daerah (Kabupaten/Kota) yang ada di Sumatera Barat untuk memberikan informasi kepada calon investor sektor untuk bidang usaha mereka berinvestasi di Sumatera Barat.

Keluaran yang dicapai dalam kegiatan yaitu:

- Buku Potensi Investasi Sumatera Barat sebanyak 100 buah
- Buku Profil Investasi sebanyak 100 buah (2 bahasa)
- Leaflet peluang investasi sebanyak 500 buah (2 bahasa)

Keluaran ini akan menghasilkan kemudahan bagi investor/calon investor dalam memperoleh data dan informasi potensi dan peluang investasi bagi 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

**o. Penyusunan *Feasibility Study* Proyek Investasi Sektor Industri**

dengan jumlah dana sebesar Rp. 209.062.000,- dan realisasi sebesar Rp. 181.852.050,- (86,98%), untuk realisasi fisik tercapai 100%.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif yang tepat dalam berinvestasi dimana dilakukan identifikasi kelayakan teknis, pasar, dan finansial agar dapat memberikan informasi mengenai kelayakan teknis pasar, dan finansial di Provinsi Sumatera Barat bagi investor. Sedangkan

tujuan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan penghasilan nelayan kecil dengan cara pengadaan dan perbaikan kapal dengan alih teknologi dari yang berbahan kayu ke *Fiber*.

Kegiatan ini dilaksanakan Konsultan PT. Poly Arsitektur melalui LPSE dan ditunjuk oleh ULP sesuai Surat Perjanjian Nomor 03/SP-Kapal/BKPM & PPT-2016 tanggal 25 Mei 2016. Tenaga ahli yang dilibatkan dalam kegiatan ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari Ketua Tim/Ahli Ekonomi Pembangunan, Ahli Ekonomi Industri, Ahli Ekonomi, Ahli Perkapalan, Ahli Perikanan, Ahli Teknik Sipil, Ahli Sosiologi Antropologi.

Langkah-langkah yang dilakukan pada saat persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a) Melakukan kajian data primer dan sekunder hasil dari kabupaten/kota daerah pesisir pantai di Provinsi Sumatera Barat dan melakukan *cross check* data ke dinas terkait di Provinsi.
- b) Menyiapkan desain studi yang terstruktur dan sistematis sebagai kerangka acuan pengumpulan data informasi di lapangan.
- c) Melakukan seluruh analisa yang dibutuhkan dalam kajian *feasibility study* serta memberikan rekomendasi akhir kegiatan ini.

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- 1 (satu) dokumen FS proyek investasi sektor industri pakan ikan yang dicetak sebanyak 100 buku (sesuai target) dalam 2 bahasa.
- *Leaflet* dalam 2 bahasa
- Jumlah peserta yang mengikuti *Workshop* sebanyak 50 peserta (target 50 peserta), tidak terlaksana dengan alasan sudah terwakili kegiatan FGD yang langsung dilaksanakan dikelompok masyarakat nelayan yang memang membutuhkan pabrik dan perawatan kapal dengan biaya murah bila dihitung ongkos produksi yang dikeluarkan mereka selama ini.

Hasil dari kegiatan ini adalah memudahkan investor/calon investor memperoleh FS investasi industri perkapalan skala kecil dan menengah dengan yang LAYAK dari aspek sumber daya, aspek potensi dasar, aspek teknis, aspek finansial, dan aspek lingkungan. Sedangkan daerah yang direkomendasikan cocok di PPI Muaro Penyalinan.

**p. Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi** dengan jumlah dana sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.074.291,- (85,19%), dan realisasi fisiknya tercapai 100%. Realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya narasumber dari Polda yang tidak bisa hadir serta sisa dari penggantian transportasi dan akomodasi narasumber.

Maksud dari kegiatan ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan peserta mengenai penyelesaian permasalahan investasi di Sumatera Barat, dengan adanya pertemuan ini diharapkan kepada seluruh Badan/kantor penanaman modal atau yang menangani fungsi penanaman modal di Kabupaten/Kota dapat membentuk Satuan Tugas Penanaman modal yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan investasi dan untuk lebih meningkatnya koordinasi/sinkronisasi antara BKPM RI, BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat dengan Badan/Kantor Penanaman Modal atau yang menangani fungsi penanaman modal di Kab/Kota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menyelesaikan permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMDN/PMA di Sumatera Barat dapat difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu Tim Satuan tugas penanaman modal yang melibatkan Instansi/lembaga teknis Terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Untuk menciptakan pemahaman bahwa betapa pentingnya Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan investasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat.
- b. Meningkatkan koordinasi antara BKPM, BKPM & PPT Provinsi Sumbar serta Badan/kantor penanaman modal atau yang membidangi urusan penanaman modal di kabupaten Kota.

Pertemuan Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi diselenggarakan di Edotel (SMKN 6 Padang) pada hari Kamis dan Jum'at tanggal 17 dan 18 November 2016. Peserta pertemuan Bimbingan teknis Penyelesaian permasalahan investasi ini berjumlah 50 orang (sesuai target) yang terdiri dari BKPM & PPT Prov. Sumbar dan Badan/Kantor



Penanaman Modal atau yang Menangani fungsi Penanaman Modal di Kab/Kota.

Pertemuan ini dilaksanakan selama 2 hari dalam bentuk pemaparan (sesuai Topik) lalu disambung dengan diskusi. Materi yang disampaikan adalah:

- “KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INVESTASI DI SUMATERA BARAT” pemapar Maswar Dedi, A.P., M.Si selaku Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar.
- “KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN INVESTASI” Pemapar Fajar Usman, selaku Widyaswara (WI) BKPM RI.
- “MEDIASI” pemapar adalah Andrea Hinan Poeloengan, SH, M.Hum, MTCP dari Pusat Mediasi Nasional (PMN)
- “PERMASALAHAN PERTAMBANGAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT SETELAH PERALIHAN KEWENANGAN PERIZINAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL” Pemapar Ir.Benni Azhar, M.Si, Selaku kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.

Hasil Pertemuan Bimbingan Teknis ini adalah:

1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Bidang Penanaman Modal yaitu unsur Pembinaan terhadap Penanaman Modal secara umum dan Penyelesaian permasalahan investasi secara khususnya.
2. Bertambahnya pengetahuan peserta tentang apa itu mediasi dan bagaimana tata cara mediasi suatu permasalahan yang ada di kabupaten/kota.

**q. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi** dengan jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangansebesar Rp. 43.842.077,- (87,68%), serta realisasi fisik tercapai 100%. Sedangkan capaian kinerja melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu dari 7 kabupaten/kota yang menjadi target untuk dilakukan koordinasi tercapai sebanyak 12 kabupaten/kota dan 6 target calon investor yang difasilitasi tercapai sebanyak 10 calon investor.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengkoordinasikan rencana promosi dan hasil promosi Sumatera Barat secara terintegrasi baik yang dilakukan oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Memfasilitasi para pengusaha/calon investor/dunia usaha yang berminat terhadap potensi daerah Sumatera Barat ke daerah tempat tujuan rencana investasi.
- Memfasilitasi misi investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam bentuk koordinasi, pendampingan maupun pertemuan sesuai kebutuhan.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya promosi dengan kabupaten/kota sebanyak 9 kabupaten/kota dapat melebihi target (target 7 kabupaten/kota).
- Jumlah calon investor yang difasilitasi sebanyak 10 calon Investor dapat melebihi target (target 6 calon investor), yaitu:
  1. SingPellet bergerak dalam industri biomassa kayu, dengan ragam produk antara lain *wood pellet* atau arang kayu
  2. *Green Waste Recycling Company* bergerak pada sektor energi biosolar berbahan dasar kayu
  3. *Green Power Co.Ltd.* Mr.Lee Hakson bergerak di bidang energi terbarukan yaitu dari sampah menjadi energi.
  4. PT. Kubic Gasco bergerak di bidang energi terbarukan yaitu pengolahan sampah menjadi listrik
  5. Christophe Mayon yang akan berinvestasi yaitu di sektor energi untuk pembangkit listrik tenaga air
  6. PT. Terapan Manajemen Teknologi yang akan berinvestasi di Sumatera Barat yaitu:
    - Pembangunan fasilitas pengolahan air
    - Pembangunan fasilitas pengolahan sampah
    - Pembangunan fasilitas pengolahan sampah B3 Rumah sakit dan industri serta perlindungan lingkungan
    - Pembangunan fasilitas pengolahan energi baru dan terbarukan
  7. *Hyundai Green Power* yang ingin berinvestasi di bidang listrik

8. *Zhejiang Bestwa Envitech, Co.Ltd* ingin berinvestasi untuk mengembangkan sistem air minum (SPAM), pengolahan limbah berbahaya dan sampah menjadi energi terbarukan
9. *Hwaseung Group* yang akan berinvestasi di bidang perkebunan karet dan industri
10. Toni Hernandez ingin berinvestasi di sektor jasa rekreasi Pariwisata di Mentawai.

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi promosi & kerjasama dengan kabupaten/kota sebanyak 9 kabupaten/kota (melebihi target 7 kabupaten/kota). Meningkatnya minat calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat dengan cara menghubungi pihak BKPM & PPT menanyakan tentang peluang investasi yang mereka minati melalui media elektronik.

- r. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan jumlah dana sebesar Rp. 86.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 82.698.900,- (96,16%). Untuk fisik tercapai juga sebesar 100%.

Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk melakukan dan mengikuti pertemuan koordinasi kelembagaan investasi daerah dalam lingkup Provinsi dan nasional untuk bertukar informasi serta mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan investasi daerah.

Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi program/kegiatan penanaman modal pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal.

Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan menyelenggarakan Pertemuan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) se Sumatera Barat yang diselenggarakan pada tanggal 3 s.d 4 Mei 2016, bertempat di Istana Bung Hatta Bukittinggi, dengan peserta sebanyak 80 orang (sesuai target) yang terdiri dari pejabat/aparatur PDKPM se-

Sumatera Barat yang menangani bidang perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal. Pertemuan ini dilaksanakan dalam bentuk pemaparan dengan metode diskusi panel dan sidang kelompok, yang dibagi atas 4 kelompok, yaitu kelompok bidang Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal, bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, serta bidang Pelayanan Perizinan. Masing-masing kelompok membahas permasalahan dan tindak lanjut (program/kegiatan) di bidang penanaman modal. Selain itu juga telah diikuti Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) pada tanggal 21 s.d 24 Februari 2016 di Jakarta dan telah dilaksanakan koordinasi perencanaan ke kabupaten/kota.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan, promosi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal serta pelayanan perizinan tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya harmonisasi perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (sesuai target).

- s. Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota** dengan jumlah dana sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.937.100,- (26,46%), dan realisasi fisik juga 100%. Penyerapan anggaran dibawah 90% disebabkan karena kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pada BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat yang ditunda pelaksanaannya dengan jumlah penundaan anggaran Rp. 22.062.900,-, sehingga sisa anggaran yang dapat dibelanjakan adalah sebesar Rp. 7.937.100,-, artinya realisasi keuangan kegiatan ini sebenarnya telah tercapai 100%.

Maksud adanya kegiatan Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota adalah untuk menyamakan/mensinkronkan data realisasi investasi Kabupaten/Kota dengan realisasi investasi Provinsi berdasarkan LKPM yang disampaikan perusahaan setiap Triwulan ataupun setiap Semester.

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada Kabupaten/Kota tentang pentingnya LKPM yang disampaikan oleh Perusahaan PMA/PMDN, untuk menghitung realisasi investasi.
2. Kabupaten/Kota agar menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal dengan menggunakan SPIPISE sebagai Izin Awal dari perizinan lainnya.
3. Dalam rangka pencapaian target realisasi investasi diharapkan peran serta Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pertemuan Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota terlaksana 1 (satu) kali dari 2 (dua) kali rencana, 1 (satu) kali pertemuan ditunda pelaksanaannya sesuai surat Kepala BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/400/Perenc-2016 perihal Penyampaian kegiatan pada BKPM&PPT Prov.Sumbar yang ditunda pelaksanaannya sesuai Rapat Pembahasan DPPA-SKPD yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala DPKD. Peserta kegiatan adalah Instansi Penanaman Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan peserta sebanyak 40 orang.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terdatanya data realisasi investasi PMA/PMDN di Sumatera Barat melalui 1 kali pertemuan dengan peserta 40 orang (sesuai target), sedangkan 1 kali pertemuan lagi ditunda pelaksanaannya.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data realisasi investasi PMA/PMDN di 19 kab./kota di Sumatera Barat serta:

- Sinkronnya/samanya data realisasi investasi Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat.
- Terciptanya kesamaan persepsi antara aparatur pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## **B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan program ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** dengan jumlah dana sebesar Rp. 520.060.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 478.293.150,- (91,97%) sedangkan untuk realisasi fisik tercapai juga 100%, dan secara kinerja dapat tercapai melebihi target yakni sebesar 1.098 izin dan 7 rekomendasi (target: 600 izin/non izin).
- Maksud dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.
  - Tujuan dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk membantu penanam modal atau investor/dunia usaha dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi mengenai penanaman modal.
  - Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :
    - Pelayanan perizinan dan non perizinan di UPT-PTSP BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat menggunakan mekanisme *Front Office* (FO) dan *Back Office* (BO).
    - Pelayanan perizinan secara manual, yaitu penanam modal mengajukan permohonan perizinan secara manual ke UPT-PTSP BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat.
    - Pelayanan perizinan secara elektronik, yaitu penanam modal mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) dan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) secara elektronik baik API-Umum maupun API-Produsen ke PTSP BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat.
  - Ruang lingkup kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan bagi perusahaan/perorangan yang

berlokasi di Sumatera Barat, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Melayani permohonan perizinan berusaha sesuai kewenangan;
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari si pemohon;
3. Melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan yang diajukan pemohon;
4. Melakukan peninjauan lapangan, koordinasi dan rapat dengan instansi terkait bila diperlukan;
5. Melaksanakan proses permohonan perizinan penanaman modal melalui SPIPISE;
6. Melaksanakan proses permohonan perizinan Sektor Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor (API) umum maupun produsen yang berbasis Website (internet); dan
7. Menerbitkan dokumen perizinan berusaha.

- Keluaran Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) keluaran yaitu:
  1. Dalam rangka penyelenggaraan PTSP tahun 2016 telah diterbitkan perizinan/non perizinan sebanyak 1.027 izin/rekomendasi dapat melebihi target (target: 600 izin/rekomendasi).
  2. Telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat selama 12 bulan.
  3. Telah tersusunnya laporan data penanganan pengaduan masyarakat tahun 2016.
  4. Telah adanya perpanjangan sertifikasi ISO.
- Hasil dari kegiatan yaitu persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu dapat tercapai sesuai yang ditargetkan yakni sebesar 100%, yaitu sebanyak 36 izin dengan lamanya waktu proses sesuai SOP.

- b. Forum PTSP** dengan jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.026.000,- (34,05%), untuk realisasi fisik tercapai 100%, Penyerapan anggaran dibawah 90% disebabkan

karena Forum PTSP merupakan salah satu kegiatan pada BKPM & PPT Prov.Sumbar yang ditunda pelaksanaannya dengan jumlah penundaan anggaran Rp. 26.654.500,-, sehingga sisa anggaran yang dapat dibelanjakan adalah sebesar Rp. 23.345.500,-, artinya realisasi keuangan kegiatan ini sebenarnya telah tercapai 72,82%.

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan Forum PTSP ini dilaksanakan adalah untuk mensinkronisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota dengan PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan tahapan-tahapan:

1. Melakukan penyederhanaan perizinan, baik dari segi jumlah, persyaratan, waktu, maupun prosedur di lembaga PTSP.
2. Berbagi informasi dan berusaha mengembangkan inovasi penyelenggaraan PTSP untuk meningkatkan pelayanan prima dengan membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi dalam mendorong perekonomian daerah.
3. Melakukan reformasi birokrasi dan regulasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang masih menghambat proses penerbitan perizinan dan non perizinan dengan prinsip cepat, mudah, murah, sederhana, transparan, akuntabel dan tidak diskriminasi serta terhindar dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelaksanaan Forum PTSP direncanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan, yaitu di Kota Padang dan Kota Sawahlunto. Namun berdasarkan surat Kepala BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/400/Perenc-2016 perihal Penyampaian kegiatan pada BKPM & PPT Prov.Sumbar yang ditunda pelaksanaannya sesuai Rapat Pembahasan DPPA-SKPD yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala DPKD, pelaksanaan Forum PTSP ini hanya dilaksanakan 1 (satu) kali pertemuan, sementara 1 (satu) kali pertemuan lagi ditunda pelaksanaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya realisasi fisik kegiatan telah tercapai 100%.



Pertemuan Forum PTSP ini dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 di Edotel Minangkabau SMKN 6 Padang dengan peserta terdiri dari Pejabat/Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota dan BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat.

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (sesuai target).
- Pelaksanaan forum PTSP untuk 120 orang sebanyak 2 kali (1 kali sesuai target dengan jumlah peserta 60 orang dan 1 kali ditunda pelaksanaannya).

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya penguatan kelembagaan dan pembinaan PTSP di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dan diperoleh beberapa rumusan yaitu:

1. Isu-isu strategis yang dimunculkan:
  - a. Persamaan Standar Pelayanan Publik bagi setiap perizinan dan non perizinan di Kab./Kota di Provinsi Sumatera Barat (terdiri dari: persyaratannya, jangka waktu pelayanan, biaya, dan jenis perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan).
  - b. Koneksifitas *networking* perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh Kab./Kota dengan Pemda Provinsi Sumatera Barat.
  - c. Penanganan usaha masyarakat yang tidak mempunyai perizinan/non perizinan, seperti PETI (penambangan tambang tanpa izin), dan sebagainya.
  - d. *Tracking system* Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
2. Permasalahan:
  - a. Di setiap kabupaten/kota belum adanya kesamaan standar pelayanan perizinan dan non perizinan seperti SIUP, TDP, IMB, dan lain-lain.
  - b. Setiap perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh kab./kota belum terkoneksi dengan Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

- c. Keterpaduan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap penanganan usaha rakyat yang belum memiliki izin/non izin, terutama yang berdampak lingkungan.
  - d. Pelayanan perizinan dan non perizinan belum dapat dipantau oleh masyarakat/pemohon melalui koneksi Internet.
3. Dampak isu strategis yang dimunculkan ketika direalisasikan:
- a. Terciptanya satu kesatuan standar pelayanan bagi pelaku usaha/masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.
  - b. Terpantaunya oleh provinsi setiap perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan Kab./Kota sehingga dapat menggambarkan kondisi pelaku usaha Sumatera Barat.
  - c. Terjadinya sinergifitas penanganan masalah perizinan dan non perizinan antara Provinsi dengan Kab./Kota.
  - d. Terjadinya pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di Provinsi Sumatera Barat.

**c. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat** dengan jumlah dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 92.914.892,- (92,91%), dan fisik juga tercapai 100%.

Maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan kemampuan teknis, pengetahuan dan wawasan aparatur penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik.

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Studi teknis terkait peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 5 (lima) orang dengan target 6 (enam) orang, yaitu *Sharing Informasi* Penyelenggaraan PTSP Secara Umum untuk 2 (dua) orang di BPM Jawa Timur dan *Sharing Informasi* Penerapan Aplikasi Sistem Online untuk 3 (tiga) orang di BPMPT Jawa Timur.

- Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan terkait PTSP sebanyak 6 (enam) aparatur dengan target 7 (tujuh) aparatur, yaitu Diklat Penanaman Modal Tingkat Pertama untuk 4 (empat) orang di Cipanas (Jawa Barat) dan Magang SPIPISE untuk 2 (dua) orang di BKPM RI (Jakarta).

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman aparatur terkait penyelenggaraan PTSP terhadap 6 (enam) orang aparatur, target 7 (tujuh) orang aparatur. Target ini tidak bisa tercapai dikarenakan kurangnya anggaran untuk pelaksanaan 1 kali pelatihan lagi. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu pelaksanaan pelatihan (pelaksanaan pelatihan sekitar 6 hari, sedangkan hari pelatihan yang dianggarkan untuk 3 hari).

## PERMASALAHAN DAN SOLUSI

**S**ecara umum permasalahan yang masih terjadi dalam penanaman modal di Sumatera Barat yang teridentifikasi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal.
2. Data dan Informasi Potensi daerah yang dipromosikan kepada calon investor belum akurat.
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN serta masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
4. Dokumen perencanaan pendukung investasi di daerah yang dibutuhkan oleh calon investor belum memadai.
5. Perusahaan PMA/PMDN masih kurang terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya dan tidak melaporkannya ke BKPM & PPT Sumbar selaku *Task Force* Investasi di tingkat Provinsi.
6. Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi

dan pendidikan yang memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman modal.

7. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten, lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga, disamping itu efisiensi peradilan dalam penyelesaian sengketa masih rendah dan biaya untuk mendapatkan kepastian hukum dari peradilan di Indonesia relatif tinggi, dibandingkan negara-negara di Asia, peradilan di Indonesia termasuk lama dalam penyelesaian sengketa usaha.

Dari permasalahan di atas dapat direkomendasikan solusinya sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya dan melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi.
2. Tetap melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat serta meningkatkan kualitas bahan materi promosi terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota.
3. Meningkatkan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala didalam penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek.
4. Memfasilitasi permasalahan investasi yang dialami oleh investor dengan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak terkait sehingga permasalahan investasi, dapat dicarikan solusinya serta meningkatkan ketertiban dan kinerja tim *task force* penanaman modal.
5. Perlunya peningkatan sarana prasarana penunjang untuk menarik minat investor seperti: Jalan, Bandara, Pelabuhan, Air bersih, kelistrikan dan fasilitas umum lainnya.

Padang, 30 Desember 2016  
Kepala BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat,

**Maswar Dedi, A.P., M.Si**  
Pembina Tk.I,  
NIP.19740618 199311 1 001

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD SKPD per Desember-2016

No	Program / Kegiatan	Anggaran				Target		Realisasi						Deviasi	
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal	Jumlah	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (Rp)				Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)	
								Pegawai	Barang/Jasa	Modal	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Langsung Urusan (BLU)	0	2,458,858,000	0	2,458,858,000	97.72	100	0	2,221,653,990	0	2,221,653,990	90.35	99.53	-7.37	-0.47
1.1	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	0	1,788,798,000	0	1,788,798,000	98.35	100	0	1,633,419,948	0	1,633,419,948	91.31	99.35	-7.04	-0.65
1.1.1	PENYELESAIAN PERMASALAHAN INVESTASI	0	79,000,000	0	79,000,000	100	100.00	0	61,146,400	0	61,146,400	77.4	100.00	-22.6	0
1.1.2	SOSIALISASI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	0	44,300,000	0	44,300,000	100	100.00	0	43,379,300	0	43,379,300	97.92	100.00	-2.08	0
1.1.3	BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0	24,992,300	0	24,992,300	100	100.00	0	24,992,300	0	24,992,300	100	100.00	0	0
1.1.4	FORUM INVESTASI SUMATERA BARAT	0	33,000,000	0	33,000,000	100	100.00	0	12,058,500	0	12,058,500	36.54	65.00	-63.46	-35
1.1.5	PENYUSUNAN INSENTIF PENANAMAN MODAL	0	15,100,000	0	15,100,000	100	100.00	0	13,458,050	0	13,458,050	89.13	100.00	-10.87	0
1.1.6	PENYUSUNAN BUKU DATA PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL SUMATERA BARAT	0	80,000,000	0	80,000,000	100	100.00	0	74,121,976	0	74,121,976	92.65	100.00	-7.35	0
1.1.7	PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0	108,007,700	0	108,007,700	93.13	100.00	0	92,179,100	0	92,179,100	85.34	100.00	-7.79	0
1.1.8	PENYELENGGARAAN PROMOSI INVESTASI	0	433,594,000	0	433,594,000	100	100.00	0	431,247,404	0	431,247,404	99.46	100.00	-0.54	0
1.1.9	GELAR POTENSI DAN TEMU USAHA	0	140,796,000	0	140,796,000	100	100.00	0	139,620,000	0	139,620,000	99.16	100.00	-0.84	0
1.1.10	PENINGKATAN KERJASAMA STRATEGIS ANTARA USAHA BESAR DAN UMKMK	0	66,700,000	0	66,700,000	100	100.00	0	64,679,450	0	64,679,450	96.97	100.00	-3.03	0
1.1.11	PENINGKATAN KERJASAMA INVESTASI DENGAN LEMBAGA TERKAIT DAN DUNIA USAHA	0	39,006,000	0	39,006,000	100	100.00	0	32,709,500	0	32,709,500	83.86	100.00	-16.14	0
1.1.12	UPDATING SISTEM INFORMASI SPASIAL PENANAMAN MODAL	0	62,300,000	0	62,300,000	100	100.00	0	58,965,950	0	58,965,950	94.65	100.00	-5.35	0
1.1.13	PEMBUATAN BAHAN/MATERI PROMOSI INVESTASI	0	100,000,000	0	100,000,000	100	100.00	0	93,693,800	0	93,693,800	93.69	100.00	-6.31	0
1.1.14	PENYUSUNAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI SUMATERA BARAT	0	146,940,000	0	146,940,000	100	100.00	0	140,763,800	0	140,763,800	95.8	100.00	-4.2	0
1.1.15	PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDY PROYEK INVESTASI SEKTOR INDUSTRI	0	209,062,000	0	209,062,000	100	100.00	0	181,852,050	0	181,852,050	86.98	100.00	-13.02	0
1.1.16	BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN INVESTASI	0	40,000,000	0	40,000,000	100	100.00	0	34,074,291	0	34,074,291	85.19	100.00	-14.81	0
1.1.17	KOORDINASI PROMOSI DAN MISI INVESTASI	0	50,000,000	0	50,000,000	100	100.00	0	43,842,077	0	43,842,077	87.68	100.00	-12.32	0
1.1.18	KONSOLIDASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0	86,000,000	0	86,000,000	100	100.00	0	82,698,900	0	82,698,900	96.16	100.00	-3.84	0
1.1.19	KONSOLIDASI DATA REALISASI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	0	30,000,000	0	30,000,000	26.46	100.00	0	7,937,100	0	7,937,100	26.46	100.00	0	0
1.2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	0	670,060,000	0	670,060,000	96.02	100	0	588,234,042	0	588,234,042	87.79	100	-8.23	0
1.2.1	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	0	520,060,000	0	520,060,000	100	100.00	0	478,293,150	0	478,293,150	91.97	100.00	-8.03	0
1.2.2	FORUM PTSP	0	50,000,000	0	50,000,000	46.69	100.00	0	17,026,000	0	17,026,000	34.05	100.00	-12.64	0
1.2.3	PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU	0	100,000,000	0	100,000,000	100	100.00	0	92,914,892	0	92,914,892	92.91	100.00	-7.09	0
2	Belanja Lansung Pokok (BLP)	0	1,386,856,500	684,026,500	2,070,883,000	94.45	100	0	1,301,111,950	564,316,500	1,865,428,450	90.08	100	-4.37	0
2.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	0	753,405,748	54,800,000	808,205,748	100	100	0	709,832,216	45,695,000	755,527,216	93.48	100	-6.52	0
2.1.1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	0	21,665,000	0	21,665,000	100	100.00	0	19,905,051	0	19,905,051	91.88	100.00	-8.12	0
2.1.2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	0	213,681,500	0	213,681,500	100	100.00	0	180,284,714	0	180,284,714	84.37	100.00	-15.63	0
2.1.3	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	0	87,750,000	0	87,750,000	100	100.00	0	87,256,175	0	87,256,175	99.44	100.00	-0.56	0
2.1.4	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	0	32,000,000	0	32,000,000	100	100.00	0	31,641,000	0	31,641,000	98.88	100.00	-1.12	0
2.1.5	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	0	21,000,000	0	21,000,000	100	100.00	0	19,580,500	0	19,580,500	93.24	100.00	-6.76	0
2.1.6	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	0	7,500,000	0	7,500,000	100	100.00	0	7,498,000	0	7,498,000	99.97	100.00	-0.03	0
2.1.7	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	0	8,000,000	54,800,000	62,800,000	100	100.00	0	6,888,000	45,695,000	52,583,000	83.73	100.00	-16.27	0
2.1.8	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	13,200,000	0	13,200,000	100	100.00	0	12,000,000	0	12,000,000	90.91	100.00	-9.09	0
2.1.9	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	0	16,064,500	0	16,064,500	100	100.00	0	15,680,000	0	15,680,000	97.61	100.00	-2.39	0
2.1.10	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN KE LUAR DAERAH	0	234,911,000	0	234,911,000	100	100.00	0	232,725,318	0	232,725,318	99.07	100.00	-0.93	0
2.1.11	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	0	82,633,748	0	82,633,748	100	100.00	0	82,323,458	0	82,323,458	99.62	100.00	-0.38	0
2.1.12	PENYEDIAAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR	0	15,000,000	0	15,000,000	100	100.00	0	14,050,000	0	14,050,000	93.67	100.00	-6.33	0
2.2	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	0	31,320,000	0	31,320,000	100	100	0	31,320,000	0	31,320,000	100	100	0	0
2.2.1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	0	31,320,000	0	31,320,000	100	100.00	0	31,320,000	0	31,320,000	100	100.00	0	0

2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	147,922,000	0	147,922,000	100	100	0	147,777,000	0	147,777,000	99.9	100	-0.1	0
2.3.1	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	147,922,000	0	147,922,000	100	100.00	0	147,777,000	0	147,777,000	99.9	100.00	-0.1	0
2.4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0	274,928,752	0	274,928,752	96.68	100	0	243,863,750	0	243,863,750	88.7	100	-7.98	0
2.4.1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	0	16,900,000	0	16,900,000	100	100.00	0	16,895,000	0	16,895,000	99.97	100.00	-0.03	0
2.4.2	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	0	62,308,752	0	62,308,752	85.34	100.00	0	49,263,350	0	49,263,350	79.06	100.00	-6.28	0
2.4.3	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	0	171,300,000	0	171,300,000	100	100.00	0	154,050,000	0	154,050,000	89.93	100.00	-10.07	0
2.4.4	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN	0	24,420,000	0	24,420,000	100	100.00	0	23,655,400	0	23,655,400	96.87	100.00	-3.13	0
2.5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0	179,280,000	629,226,500	808,506,500	86.93	100	0	168,318,984	518,621,500	686,940,484	84.96	100	-1.96	0
2.5.1	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	0	0	388,676,500	388,676,500	100	100.00	0	0	388,676,500	388,676,500	100	100.00	0	0
2.5.2	PENGADAAN MEUBELEUR	0	0	61,000,000	61,000,000	100	100.00	0	0	61,000,000	61,000,000	100	100.00	0	0
2.5.3	PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	0	0	124,250,000	124,250,000	14.93	100.00	0	0	17,575,000	17,575,000	14.14	100.00	-0.79	0
2.5.4	PENGADAAN PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	0	0	55,300,000	55,300,000	100	100.00	0	0	51,370,000	51,370,000	92.89	100.00	-7.11	0
2.5.5	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	0	50,000,000	0	50,000,000	100	100.00	0	50,000,000	0	50,000,000	100	100.00	0	0
2.5.6	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	0	70,000,000	0	70,000,000	100	100.00	0	63,050,284	0	63,050,284	90.07	100.00	-9.93	0
2.5.7	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	0	28,500,000	0	28,500,000	100	100.00	0	24,937,200	0	24,937,200	87.5	100.00	-12.5	0
2.5.8	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELEUR	0	6,000,000	0	6,000,000	100	100.00	0	5,850,000	0	5,850,000	97.5	100.00	-2.5	0
2.5.9	PENGLOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASSET SKPD	0	24,780,000	0	24,780,000	100	100.00	0	24,481,500	0	24,481,500	98.8	100.00	-1.2	0
3	Belanja Tidak Langsung(BTL)	4,308,747,705	0	0	4,308,747,705	100	100	4,197,541,104	0	0	4,197,541,104	97.42	100	-2.58	0
3.1	BELANJA PEGAWAI	4,308,747,705	0	0	4,308,747,705	100	100	4,197,541,104	0	0	4,197,541,104	97.42	100	-2.58	0
3.1.1	GAJI DAN TUNJANGAN	3,144,161,727	0	0	3,144,161,727	100	100.00	3,127,282,537	0	0	3,127,282,537	99.46	100.00	-0.54	0
3.1.2	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,146,075,978	0	0	1,146,075,978	100	100.00	1,053,434,008	0	0	1,053,434,008	91.92	100.00	-8.08	0
3.1.3	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	18,510,000	0	0	18,510,000	100	100.00	16,824,559	0	0	16,824,559	90.89	100.00	-9.11	0
	Jumlah	4,308,747,705	3,845,714,500	684,026,500	8,838,488,705	98.07	100	4,197,541,104	3,522,765,940	564,316,500	8,284,623,544	93.73	99.87	-4.33	-0.1

Padang, Desember 2016  
Kepala BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat

**Maswar Dedi, A.P., M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19740618 199311 1 001